

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

1. Bulan Juli 2025

Perkembangan inflasi di Kota Lubuk Linggau pada triwulan III Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

64. Pada Juli 2025 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Kota Lubuk Linggau sebesar 2,61 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,64. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,95 persen dengan andil inflasi sebesar 0,90 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,89 persen dengan andil inflasi sebesar 0,05 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,62 persen dengan andil inflasi sebesar 1,24 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,86 persen dengan andil inflasi sebesar 0,14 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,94 persen dengan andil inflasi sebesar 0,05 persen; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 2,26 persen dengan andil inflasi sebesar 0,05 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,23 persen dengan andil inflasi sebesar 0,06 persen; kelompok penyedia makanan dan minuman/restoran sebesar 1,36 persen dengan andil inflasi sebesar 0,10 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 13,67 persen dengan andil inflasi sebesar 1,02 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks yaitu: kelompok transportasi sebesar 0,24 persen dengan andil inflasi sebesar 0,03 persen; dan kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,64 persen dengan andil inflasi sebesar 0,03 persen. Tingkat Inflasi month to month (m-to-m) bulan juli sebesar 0,21 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) Kota Lubuk Linggau bulan Juli sebesar 2,04 persen.

Pada Juli 2025, tingkat inflasi y-on-y Kota Lubuk Linggau sebesar 2,61 persen dan tingkat inflasi y-to-d sebesar 2,04 persen. Tingkat inflasi y-on-y untuk April 2024 sebesar 2,45 persen, sedangkan tingkat inflasi y-on-y untuk Juli 2025 sebesar 4,27 persen.

Tabel Tingkat Inflasi Month to Month (m-to-m), Year to Date (y-to-d), dan Year on Year(y-on-y) Kota Lubuk Linggau bulan Juli 2023-2025
Tabel Tingkat Inflasi Month to Month (m-to-m), Year to Date (y-to-d), dan Year on Year(y-on-y) Kota Lubuk Linggau bulan Juli 2023-2025 (Persen)

Tingkat Inflasi	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Month to Month (m-to-m)	0,31	-0,31	1,21
Year to Date (y-to-d)	0,52	0,45	1,04
Year on Year (y-on-y)	4,39	1,45	2,61

Tingkat Inflasi Year on Year (y-on-y) Kota Lubuk Linggau

bulan Juli, 2023- 2025 (Persen)

2. Bulan Agustus 2025

71. Pada Agustus 2025 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Kota Lubuk Linggau sebesar 2,92 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,71. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,55 persen dengan andil inflasi sebesar 1,37 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,87 persen dengan andil inflasi sebesar 0,05 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,55 persen dengan andil inflasi sebesar 0,23 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,77 persen dengan andil inflasi sebesar 0,14 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,86 persen dengan andil inflasi sebesar 0,05 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 2,48 persen dengan andil inflasi sebesar 0,05 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,34 persen dengan andil inflasi sebesar 0,07 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,50 persen dengan andil inflasi sebesar 0,11 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 12,04 persen dengan andil inflasi sebesar 0,91 persen. Sementara kelompok yang mengalami penurunan indeks yaitu: kelompok transportasi sebesar -0,59 persen dengan andil inflasi sebesar 0,03 persen; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar -0,59 persen dengan andil inflasi sebesar 0,03 persen.

Tingkat inflasi month to month (m-to-m) bulan Agustus 2025 sebesar 0,07 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) Kota Lubuk Linggau bulan Agustus 2025 sebesar 2,10 persen.

Tingkat Inflasi Month to Month (m-to-m), Year to Date (y-to-d), dan Year on Year (y-on-y) Kota Lubuk Linggau bulan Agustus, 2023-2025 (Persen)

Tingkat Inflasi (1)	2023 (2)	2024 (3)	2025 (4)
Month to Month (m-to-m)	-0,04	-0,24	0,07
Year to Date (y-to-d)	1,48	0,21	2,10
Year on Year (y-on-y)	2,86	1,31	2,92

Inflasi Year on Year (y-on-y) Kota Lubuk Linggau

3. Bulan September 2025

Pada September 2025 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Kota Lubuk Linggau sebesar 2,07 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,00 persen. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 109,58 persen dengan andil inflasi sebesar 1,62 persen; Kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 103,50 persen dengan andil inflasi sebesar 0,05 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 103,82 persen dengan andil inflasi sebesar 0,14 persen; kelompok kesehatan sebesar 104,66 persen dengan andil inflasi sebesar 0,05 persen; kelompok transportasi sebesar 110,98 persen dengan andil inflasi sebesar 0,01 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 105,55 persen Dengan andil inflasi sebesar 0,05; kelompok pendidikan sebesar 106,19 persen dengan andil inflasi sebesar 0,08 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 105,29 persen dengan andil inflasi sebesar 0,11 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 126,15 persen dengan andil inflasi sebesar 0,96 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 103,89 persen dengan andil inflasi sebesar 0,22 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 94,34 persen dengan andil inflasi sebesar 0,03 persen.

Tingkat inflasi month to month (m-to-m) bulan September 2025 sebesar 0,27 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) Kota Lubuk Linggau bulan September 2025 sebesar 2,38 persen.

Tingkat Inflasi Month to Month (m-to-m), Year to Date (y-to-d), dan Year on Year (y-on-y) Kota Lubuk Linggau bulan September, 2023-2025 (Persen)

Tingkat Inflasi	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Month to Month (m-to-m)	0,34	-0,06	0,27
Year to Date (y-to-d)	1,82	0,15	1,38
Year on Year (y-on-y)	2,15	1,11	3,26

Gambar 1 Tingkat Inflasi Year on Year (y-on-y) Kota Lubuk Linggau bulan September, 2023-2025 (Persen)

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Pada Triwulan III Tahun 2025, dinamika inflasi Kota Lubuk Linggau menunjukkan adanya tekanan harga yang dipengaruhi oleh kombinasi faktor pasokan, distribusi, pola musiman, serta respons kebijakan yang belum optimal. Secara umum, beberapa komoditas strategis memberikan andil signifikan, terutama pada kelompok pangan bergejolak (volatile food), sehingga memerlukan perhatian khusus dari seluruh pemangku kepentingan.

Pertama, **ketidakstabilan pasokan komoditas hortikultura**, khususnya cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah, masih menjadi sumber utama tekanan inflasi. Kondisi cuaca yang tidak stabil pada awal triwulan, disertai penurunan produksi dari wilayah sentra sekitar (Musi Rawas, Empat Lawang, dan Rejang Lebong), menyebabkan masuknya pasokan dari luar daerah dengan harga lebih tinggi. Hal ini diperparah oleh kurangnya pola tanam terjadwal yang mampu menjaga kontinuitas suplai.

Kedua, **fluktuasi harga beras** tetap menjadi isu menonjol. Keterbatasan stok beras medium di tingkat distributor dan kenaikan harga di tingkat penggilingan akibat kenaikan harga gabah nasional menyebabkan harga eceran beras cenderung berada di atas rata-rata triwulan sebelumnya. Intervensi stabilisasi berupa OPD/OPM belum sepenuhnya menahan laju kenaikan karena keterbatasan volume dan jangkauan distribusi.

Ketiga, dari sisi distribusi, **kendala logistik antarwilayah** turut mempengaruhi kelancaran arus barang. Beberapa hambatan aksesibilitas dan peningkatan biaya transportasi berdampak pada margin harga komoditas pangan yang dipasok dari luar kota. Hal ini terasa terutama pada komoditas daging ayam ras dan telur ayam, yang harganya sensitif terhadap biaya pengiriman.

Keempat, **peningkatan permintaan musiman** pada periode tahun ajaran baru dan menjelang peringatan hari-hari besar keagamaan lokal menimbulkan tekanan tambahan pada kelompok komoditas pendidikan, pakaian, serta makanan-minuman. Lonjakan permintaan ini tidak selalu diimbangi peningkatan pasokan, sehingga memberikan andil terhadap kenaikan inflasi inti.

Kelima, dari sisi kebijakan, **koordinasi dan intensitas pelaksanaan program 4K (Ketersediaan, Keterjangkauan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif)** masih perlu diperkuat. Program seperti Gerakan Menanam Pekarangan, operasi pasar murah, dan pencatatan harga harian telah berjalan, namun belum menghasilkan pengaruh signifikan terhadap stabilisasi pasokan di beberapa komoditas strategis. Komunikasi publik terkait kewaspadaan inflasi juga perlu ditingkatkan agar masyarakat memperoleh informasi yang lebih cepat dan akurat. Secara keseluruhan, tekanan inflasi pada Triwulan III Tahun 2025 di Kota Lubuk Linggau terutama dipengaruhi oleh **ketergantungan pasokan antarwilayah, lemahnya kontinuitas produksi lokal, gangguan distribusi, dan lonjakan permintaan musiman**. Identifikasi ini menjadi dasar penting bagi perumusan langkah pengendalian yang lebih terarah pada triwulan berikutnya, terutama memperkuat kolaborasi TPID lintas daerah, memperluas cadangan pasokan untuk komoditas kritis, serta mendorong intervensi hulu-hilir berbasis data harga yang lebih adaptif.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Mekanisme Koordinasi TPID

Tugas-tugas TPID dilakukan melalui pertemuan dalam bentuk high level meeting dan melalui mekanisme koordinasi, yaitu dengan melakukan rapat koordinasi untuk merumuskan rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti pemerintah daerah untuk mencegah dan menanggulangi kenaikan dan ketidakstabilan inflasi serta melakukan koordinasi dengan TPID di tingkat Provinsi.

Mekanisme koordinasi TPID :

Monitoring, Evaluasi serta Kebijakan pengendalian inflasi
Monitoring, Evaluasi serta Kebijakan pengendalian inflasi

TPID KAB/KOTA

TPID PROV.

KEMENTERIAN
DALAM NEGERI

Laporan TPID Kab/Kota

Laporan TPID Prov/Kab/Kota

Kepada Gubernur

Pelaksanaan Program Kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Kota Lubuklinggau pada Triwulan I tahun 2025 mengacu pada 9 langkah upaya dalam pengendalian inflas dalam rangka pemenuhan program kerja pengendalian inflasi yang mencakup 4 k yaitu : keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif. Pada triwulan ke 1 tahun 2025 ini pemeritah kota lubuklinggau telah melaksanakan 5 upaya dari 9 langkah upaya berikut. Adapun 5 upaya dalam pengendalian inflasi yang telah dilakukan pemerintah kota lubuklingga adalah sebagai berikut :

1. Pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia.

Kegiatan pemantauan harga dilakukan setiap hari oleh petugas dari disperindag untuk dilaporkan di system pemantauan pasar dan kebutuhan pokok (SP2KP). Adapun komoditi yang dipantau antara lain : beras, gula pasir, minyak goreng, tepung terigu, cabe merah, cabe rawit, bawang merah, bawang putih, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, jagung pipilan, garam halus, kedelai, ikan segar, semen, biji kontruksi, baja ringan, triplek, kayu balok, kayu papan, paku, pupuk, benih dan gas LPG 3 kg. selain itu disperindag juga melakukan pemantaun harga kebutuhan pokok lainnya yang melekat secara tupoksi pada disperindag kota lubuklinggau.

Kegiatan pemantauan stok pangan yang dilakukan petugas dinas ketahanan pangan setiap minggunya dengan mendata stok yang di bulog, distributor pedagang grosir, dan pedagang eceran. Kegiatan pemantauan ini bertujuan untuk tercapainya ketersediaan bahan pangan utama dengan harga yang stabil dan tersedianya data panel/informasi harga dan pasokan pangan di tingkat produsen, pedagang grosir dan pedagang eceran secara berkala. Adapun komoditi yang menjadi objeknya antara lain : komoditi beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabe besar, cabe rawit, daging sapi, daging ayam, telur ayam, gula pasir, minyak goring, dan tepung terigu. Variable yang menjadi tolak ukurnya adalah stok awal, jumlah produksi, barang yang diimpor, barang yang diekspor, ketersediaan barang dan perkiraan kebutuhan.

Foto pemantuan harga oleh petugas dari disperindag kota lubuklinggau

Foto pemantauan harga dan stok oleh dinas ketahanan pangan kota Lubuklinggau

1. Rapat teknis tim pengendali inflasi daerah

Pemerintah kota Lubuklinggau melalui tim TPID melakukan rapat teknis tim pengendali inflasi daerah dalam upaya pengendalian inflasi. Adapun rapat yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Sekjen Kemeterian Dalam Negeri

Via Zoom Meeting

Hari / tanggal : Senin / 7 Juli 2025

Tempat : Ruang Command Center Pemkot Lubuk Linggau

UBUK LINGGAU-Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hidayat melalui Staf Ahli II Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, H Kamaludin mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi tahun 2025 yang digelar secara virtual melalui Zoom di Command Center Kota Lubuk Linggau, Senin (7/7/2025). Rapat koordinasi ini dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian. Dalam arahannya, Mendagri menyampaikan bahwa pertemuan kali ini difokuskan pada dua isu utama, yakni pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi nasional. Dalam pembahasannya, Tito Karnavian menjelaskan bahwa inflasi terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Inflasi Volatile Foods, yaitu inflasi yang disebabkan oleh fluktuasi harga barang dan jasa yang tidak stabil.
2. Inflasi Administered Prices, yaitu inflasi pada barang dan jasa yang harganya diatur oleh pemerintah, seperti tarif listrik dan BBM.
3. Core Inflation (Inflasi Inti), yaitu inflasi yang disebabkan oleh perkembangan ekonomi makro secara umum, seperti permintaan dan penawaran di pasar.

Untuk menangani dinamika harga yang sangat fluktuatif, pemerintah menerapkan sistem Indeks Perkembangan Harga (IPH). Melalui IPH, petugas Daerah Pengendali Inflasi (DPI) dari kabupaten/kota diwajibkan turun langsung ke pasar, pelabuhan, bandara, hingga mengecek tarif angkutan udara dan harga kebutuhan pokok minimal dua kali dalam seminggu. Data dari IPH ini memungkinkan pemerintah pusat memetakan wilayah dengan tingkat inflasi tertinggi

setiap minggunya, sebelum dirilis data resmi bulanan. Selain inflasi, rapat juga menyoroti kondisi pertumbuhan ekonomi nasional yang dipengaruhi oleh situasi global, termasuk konflik geopolitik seperti ketegangan antara Israel dan Amerika Serikat, serta potensi gangguan di Selat Hormuz—salah satu dari delapan titik strategis (choke points) perdagangan dunia. Gangguan di wilayah tersebut

Staf Ahli bidang Ekonomi dan Pembangunan didampingi Bagian Perekonomian dan SDA beserta OPD terkait Mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Sekjen Kementerian Dalam Negeri tanggal 07 juli 2025

2. Mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Sekjen Kementerian Dalam Negeri Via Zoom Meeting

Hari / tanggal : Senin / 14 Juli 2025

Tempat : Ruang Command Center Pemkot Lubuk Linggau

LUBUK LINGGAU-Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hidayat melalui Plt Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, H Heri Zulianta, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi tahun 2025 secara virtual melalui Zoom Meeting di Command Center Kota Lubuk Linggau, Senin (14/7/2025). Rakor dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsu Tohir, yang dalam arahannya menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan operasi pasar guna menekan harga kebutuhan pokok di berbagai wilayah. Tomsu juga meminta agar setiap minggu disampaikan data realisasi per provinsi agar pemerintah pusat bisa memantau turunnya harga serta mengidentifikasi hambatan di lapangan. “Jika harga hanya turun sedikit, akan dicek apa penyebabnya. Pemerintah daerah harus aktif berperan,” tambahnya. Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa inflasi nasional bulan Juni 2025 berada dalam kondisi aman, tercatat sebesar 0,19%. Secara tahunan (year-on-year), inflasi mencapai 1,87%, sedangkan secara kalender (Januari-Juni 2025) sebesar 1,38%. Dari sisi komponen harga bergejolak, BPS mencatat bahwa sejak tahun 2022 hingga Juni 2025, komponen ini cenderung lebih sering mengalami inflasi daripada deflasi. Pada Juni 2025, harga-harga dalam kelompok ini kembali mengalami inflasi setelah dua bulan sebelumnya (April dan Mei) mencatat deflasi. Kontributor inflasi terbesar pada Juni 2025 adalah beras dengan andil 0,04%, diikuti cabai rawit, bawang merah, dan tomat. Kenaikan harga-harga tersebut menjadi perhatian pemerintah dalam pengambilan kebijakan pengendalian harga ke depan

Asiten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan didampingi Kabag perekonomian dan Kabid Pokting Disperindag mengikuti Mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Sekjen Kementerian Dalam Negeri Tanggal 14 juli 2025

3. Mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Sekjen Kementrian Dalam Negeri via Zoom Meeting

Hari / tanggal : Selasa / 29 Juli 2025

Tempat : Ruang Command Center Pemkot Lubuk Linggau

LUBUK LINGGAU-Staf Ahli II Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Setda Kota Lubuk Linggau, Kamaludin, didampingi Kabag Perekonomian dan SDA, Yulia Efrina, mengikuti rapat koordinasi Pengendalian Inflasi secara virtual melalui Zoom Meeting dari Command Center Pemkot Lubuk Linggau, Selasa (29/7/2025). Rapat ini dipimpin Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Tomsu Tohir, yang memaparkan perkembangan inflasi nasional dan daerah berdasarkan data bulan Juni 2025. Ia menyampaikan bahwa sepuluh provinsi mencatatkan inflasi tertinggi, yakni Papua Selatan, Bali, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, DIY, NTB, Sulawesi Tengah, Sumsel, Papua Tengah, dan Lampung. Diharapkan angka inflasi dapat turun pada Juli ini dengan adanya koordinasi lintas sektor. "Rata-rata inflasi nasional sebesar 1,87 persen. Angka ini terbentuk dari kontribusi inflasi kabupaten, kota, dan provinsi. Saat ini ada 65 kabupaten dan 44 kota yang mencatatkan inflasi di atas rata-rata nasional," ujarnya.

Ia juga menyoroti kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di beberapa provinsi, dengan DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, dan Bali berada di peringkat teratas. DKI Jakarta diminta segera melakukan evaluasi atas lonjakan harga yang terjadi secara umum. Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, menjelaskan tren inflasi bulan Juli dari tahun ke tahun. Dari 2021 hingga 2024, bulan Juli cenderung mengalami inflasi, kecuali pada 2024 yang mencatat deflasi 0,18 persen akibat penurunan harga bawang merah. "Inflasi Juli biasanya lebih tinggi dari Juni. Kami akan merilis data resmi inflasi Juli 2025 pada 1 Agustus mendatang. Pola yang terlihat adalah kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar inflasi," jelasnya. Ia juga menambahkan bahwa komponen harga bergejolak seperti cabai merah, cabai rawit, bawang merah, serta tarif angkutan udara dan biaya pendidikan masih menjadi pendorong utama inflasi di bulan Juli dalam beberapa tahun terakhir.

Foto Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi dan Pembangunan didampingi Kepala Bagian Perekonomian dan SDA dan Kabid Perekonomian Bappedalitbang mengikuti Rakor bersama Kemendagri tanggal 29 Juli 2025

4. Pelaksanaan Kegiatan Rilis Berita Resmi Statistik

Hari / tanggal : Jum'at/ 01 Agustus 2025

Tempat : Ruangan Command Center Pemkot Lubuk Linggau

Foto Asiten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan didampingi Kepala Bappedalitbang Kota Lubuk Linggau dan Kepala BPS Kota Lubuk Linggau mengikuti Rilis Statistik Resmi Inflasi Juli 2025

5. Mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Sekjen Kementrian Dalam Negeri via Zoom Meeting

Hari / tanggal : Senin / 11 Agustus 2025

Tempat : Ruang Command Center Pemkot Lubuk Linggau

Wakil Wali Kota Lubuk Linggau, H Rustam Effendi menghadiri rapat Inflasi bersama Kemendagri via Zoom Meeting di Command Center Pemkot Lubuk Linggau, Senin (11/8/2025). Turut mendampingi Plt Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, H Heri Zulianta, Staf Ahli II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, H Kamaludin, Inspektur, H Resti Irwan Putra, Kepala Dinas Perkim Febrio Fadilah, Inspektur, H Resti Irwan Putra Kabid Datin Diskominfo, Arik Sandra Jaya.

Wakil Wali Kota Lubuk Linggau mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Sekjen Kementrian Dalam Negeri via Zoom Meeting di Command Center tanggal 11 Agustus 2025

6. Wali Kota Lubuk Linggau Mengikuti Zoom Meeting Launching GPM

Hari / tanggal : Kamis / 14 Agustus 2025

Tempat : Polres LubukLinggau Ruang Rapat Pemkot Lubuk Linggau

Wali Kota Lubuklinggau H Rachmat Hidayat hadir kegiatan zoom meeting dalam rangka Launching Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dilaksanakan di Polres Lubuklinggau. Kegiatan ini juga diikuti oleh kapolres Lubuklinggau AKBP Adhitya Bagus Arjunadi beserta jajaran perwira polres Lubuklinggau serta sejumlah kepala OPD dilingkungan Pemkot Lubuklinggau.

Secara nasional, kegiatan ini diluncurkan langsung oleh Kapolri, Jendral Listyo Sigit Prabowo. Kegiatan ini berlangsung di kompleks Bulog Kanwil DKI Jakarta, Kamis (14/8/2025). Gerakan Pangan Murah ini dilakukan secara serentak oleh polda jajaran di Indonesia. Jenderal Sigit mengapresiasi progres penyaluran pangan murah melalui Gerakan Pangan Murah di daerah. Menurutnya, penyaluran pangan murah kepada masyarakat sangat membantu meringankan beban masyarakat.

Wali Kota Lubuk Linggau mengikuti Zoom Meeting launching Gerakan Pangan Murah di Polres Lubuk Linggau tanggal 14 Agustus 2025

7. Mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Sekjen Kementrian Dalam Negeri via Zoom Meeting

Hari / tanggal : Selasa / 19 Agustus 2025

Tempat : Ruangan Rapat Command Center Pemkot Lubuk Linggau

Wali Kota Lubuk Linggau H Rachmat Hidayat melalui Staf Ahli II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, H Kamaludin Menghadiri Rapat Inflasi bersama Kemendagri Via Zoom Meeting di Command Center Pemkot Lubuk Linggau, Selasa (19/8/2025).

Wali Kota Lubuk Linggau H Rachmat Hidayat melalui Staf Ahli II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, H Kamaludin Menghadiri Rapat Inflasi bersama Kemendagri Via Zoom Meeting di Command Center Pemkot Lubuk Linggau, Selasa (19/8/2025).

Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi dan Pembangunan didampingi oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan beserta Kepala Dinas Pertanian mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Sekjen Kementerian Dalam Negeri via Zoom Meeting di Command Center tanggal 19 Agustus 2025

8. Mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Sekjen Kementerian Dalam Negeri via Zoom Meeting

Hari / tanggal : Senin / 25 Agustus 2025

Tempat : Ruang Rapat Command Center Pemkot Lubuk Linggau

Staf Ahli II Hadiri Rakor Pengendalian Inflasi Bersama Kemendagri via Zoom LUBUK LINGGAU - Wali Kota Lubuk Linggau melalui Staf Ahli II Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Kamaludin mengikuti rapat koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual melalui Zoom Meeting di Command Center Pemkot Lubuk Linggau, Senin (25/8/2025). Dalam arahannya, Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsu Tohir, menegaskan pentingnya upaya maksimal dari pemerintah daerah dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok yang masih tinggi (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan). Ia mendorong agar operasi beras SPHP diperluas hingga ke tingkat desa dan kelurahan, tidak hanya berhenti di tingkat kecamatan "Kedepannya distribusi harus dipetakan dengan baik oleh Kementerian Perdagangan. Dengan pengawasan distribusi, kita bisa mengetahui di mana letak kenaikan harga yang tidak wajar. Bila distribusi cukup namun harga tetap tinggi, berarti ada oknum distributor yang bermain. Kedepannya Kepala daerah dapat melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk mengatasi hal ini," tegasnya. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widayanti, menyampaikan bahwa berdasarkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu ketiga Agustus 2025, sebanyak 14 provinsi mengalami kenaikan IPH, 23 provinsi mengalami penurunan, dan 1 provinsi tercatat stabil dibandingkan bulan sebelumnya.

Komoditas yang paling berkontribusi terhadap kenaikan IPH adalah cabai merah, bawang merah, beras, dan minyak goreng. Adapun 10 kabupaten/kota dengan IPH tertinggi antara lain Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Aceh Jaya. Sementara itu, daerah dengan penurunan IPH terdalam meliputi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kota Tomohon, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Melawai, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Minahasa Tenggara.

Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi dan Pembangunan didampingi oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Bulog beserta Kepala Dinas Pertanian mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Sekjen Kementerian Dalam Negeri via Zoom Meeting di Command Center tanggal 25 Agustus 2025

9. Mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Sekjen Kementerian Dalam Negeri via Zoom Meeting

Hari / tanggal : Selasa / 2 September 2025

Tempat : Ruang Rapat Command Center Pemkot Lubuk Linggau

Wakil Wali Kota Lubuk Linggau Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi dan Situasi Nasional Bersama Kemendagri LUBUK LINGGAU-Wakil Wali Kota Lubuk Linggau, H Rustam Effendi, mengikuti rapat koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi dan Situasi Terkini yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual melalui Zoom Meeting, Selasa (2/9/2025). Rapat tersebut diikuti dari Command Center Pemkot Lubuk Linggau. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, dalam arahannya menyampaikan bahwa rakor kali ini membahas dua poin utama, yakni perkembangan inflasi nasional dan situasi keamanan terkini di berbagai daerah.

Menurut Mendagri, angka inflasi secara nasional per tahun saat ini tercatat sebesar 2,31 persen, yang dinilai masih dalam kategori terkendali dan mengalami penurunan. Ia meminta kepala daerah untuk mendukung penuh program prioritas Presiden RI demi menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Terkait situasi nasional, Mendagri menyinggung aksi unjuk rasa yang berlangsung sejak 25 Agustus 2025 di 107 titik pada 32 provinsi. Aksi tersebut menyuarakan sejumlah tuntutan seperti penolakan kenaikan tunjangan DPR, penolakan RUU KUHP, pengesahan RUU perampasan aset dan isu lainnya. Beberapa daerah bahkan mengalami kerusakan akibat aksi tersebut. Menanggapi hal ini, Presiden RI telah mengambil langkah-langkah strategis, mulai dari menggelar rapat kabinet, berkoordinasi dengan organisasi kemasyarakatan keagamaan, partai politik, hingga sidang paripurna, serta menginstruksikan rapat koordinasi lintas daerah. Mendagri menekankan agar kepala daerah tidak meninggalkan wilayahnya masing-masing dan mengambil langkah-langkah proaktif dalam menjaga ketertiban dan kondusifitas daerah. "Redam aksi dengan duduk bersama tokoh masyarakat, laksanakan doa bersama, gencarkan program pro-rakyat seperti gerakan pasar murah, tunda kegiatan seremonial maupun keberangkatan ke luar negeri, dan hindari menampilkan gaya hidup mewah," tegas Mendagri. Ia juga mengapresiasi kepala daerah yang telah mengambil langkah-langkah cepat dan responsif dalam menjaga stabilitas di wilayahnya. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Menteri Perdagangan.

Wakil Wali Kota Lubuk Linggau didampingi oleh Sekretaris Daerah dan kepala Bulog Kota Lubuk Linggau beserta OPD terkait mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Sekjen Kementerian Dalam Negeri via Zoom Meeting di Command Center tanggal 02 September 2025

Wakil Wali Kota Lubuk Linggau Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi dan Situasi Nasional Bersama Kemendagri LUBUK LINGGAU-Wakil Wali Kota Lubuk Linggau, H Rustam Effendi, mengikuti rapat koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi dan Situasi Terkini yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual melalui Zoom Meeting, Selasa (2/9/2025). Rapat tersebut diikuti dari Command Center Pemkot Lubuk Linggau. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, dalam arahannya menyampaikan bahwa rakor kali ini membahas dua poin utama, yakni perkembangan inflasi nasional dan situasi keamanan terkini di berbagai daerah.

Menurut Mendagri, angka inflasi secara nasional per tahun saat ini tercatat sebesar 2,31 persen, yang dinilai masih dalam kategori terkendali dan mengalami penurunan. Ia meminta kepala daerah untuk mendukung penuh program prioritas Presiden RI demi menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Terkait situasi nasional, Mendagri menyinggung aksi unjuk rasa yang berlangsung sejak 25 Agustus 2025 di 107 titik pada 32 provinsi. Aksi tersebut menyuarakan sejumlah tuntutan seperti penolakan kenaikan tunjangan DPR, penolakan RUU KUHP, pengesahan RUU perampasan aset dan isu lainnya. Beberapa daerah bahkan mengalami kerusakan akibat aksi tersebut. Menanggapi hal ini, Presiden RI telah mengambil langkah-langkah strategis, mulai dari menggelar rapat kabinet, berkoordinasi dengan organisasi kemasyarakatan keagamaan, partai politik, hingga sidang paripurna, serta menginstruksikan rapat koordinasi lintas daerah. Mendagri menekankan agar kepala daerah tidak meninggalkan wilayahnya masing-masing dan mengambil langkah-langkah proaktif dalam menjaga ketertiban dan kondusifitas daerah. "Redam aksi dengan duduk bersama tokoh masyarakat, laksanakan doa bersama, gencarkan program pro-rakyat seperti gerakan pasar murah, tunda kegiatan seremonial maupun keberangkatan ke luar negeri, dan hindari menampilkan gaya hidup mewah," tegas Mendagri. Ia juga mengapresiasi kepala daerah yang telah mengambil langkah-langkah cepat dan responsif dalam menjaga stabilitas di wilayahnya. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Menteri Perdagangan.

Wakil Wali Kota Lubuk Linggau didampingi oleh Sekretaris Daerah dan kepala Bulog Kota Lubuk Linggau beserta OPD terkait mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Sekjen Kementerian Dalam Negeri via Zoom Meeting di Command Center tanggal 02 September 2025

10. Mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Dengan Sekjen Kemetrian Dalam Negeri Via Zoom Meeting

Hari / tanggal : Selasa / 8 September 2025

Tempat : Ruang Rapat Command Center Pemkot Lubuk Linggau

Wali Kota Lubuk Linggau melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, H Kamaludin didampingi Plt Asisten II, H Heri Zulianta mengikuti rapat koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual melalui Zoom Meeting di Command Center Pemkot Lubuk Linggau.

11. Mengikuti Rakor dengan Sekjen Kementrian Dalam Negeri via Zoom Meeting

Hari / tanggal : Selasa / 16 September 2025

Tempat : Ruang Rapat Command Center Pemkot Lubuk Linggau

Staf Ahli II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, H Kamaludin menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dipimpin langsung Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsu Tohir melalui zoom, bertempat di Command Center Pemkot Lubuk Linggau.

Dalam rapat tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) memaparkan laporan terbaru terkait pergerakan Indeks Perubahan Harga (IPH). Tercatat sebanyak 13 provinsi mengalami kenaikan IPH, sementara 23 provinsi mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya.. Adapun dua provinsi yang relatif stabil, yakni Lampung dan Papua Pegunungan dengan IPH 0%. Ketua BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan, komoditas penyumbang utama kenaikan IPH di 13 provinsi mayoritas berasal dari cabai merah, ayam ras, dan beras. Meski demikian, sebanyak 109 kabupaten/kota masih tercatat mengalami kenaikan harga beras. "Sepuluh kabupaten/kota dengan kenaikan IPH tertinggi, bahkan di atas 5%, antara lain Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, Mandailing Natal, Tapanuli Utara, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Asahan, dan Kota Pariaman," jelasnya.

Secara nasional, terdapat 165 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH, dengan catatan

tertinggi di Kota Banjar sebesar 2,24%. Peningkatan ini dipicu harga daging ayam, beras, jeruk, serta cabai rawit.

BPS juga menyoroti perbedaan antara tingkat perubahan IPH dengan level harga komoditas. Ayam ras dan cabai merah tercatat mengalami perubahan harga tinggi namun level harganya relatif rendah. Sebaliknya, beras dan minyak goreng meskipun perubahan IPH rendah, namun sudah berada pada level harga tinggi sehingga menekan daya beli masyarakat.

“Ini menjadi perhatian bersama karena pada akhirnya yang dirasakan masyarakat adalah harga di level konsumen. Walaupun perubahannya kecil, jika harga sudah tinggi tetap memberatkan,” tegas Ketua BPS. Sementara itu, Sekjen Kemendagri, Tomsu Tohir berharap rapat koordinasi ini dapat semakin memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam mengendalikan inflasi.

12. Mengikuti Rapat Koordinasi dengan Kemendagri

Hari / tanggal : Selasa / 23 September 2025

Tempat : Ruang Rapat Command Center Pemkot Lubuk Linggau

Wakil Wali Kota Lubuk Linggau, H Rustam Effendi didampingi Sekretaris Daerah H Trisko Defriyansa, mengikuti rapat koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual melalui Zoom Meeting di Command Center Pemkot Lubuk Linggau, Selasa (23/9/2025).

Turut hadir, Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, H Kamaludin, Kabag Perekonomian dan SDA, Yulia Efrina, Kabag Prokopim, Taufik Hidayat dan perwakilan OPD terkait. (*/esa).

13. Rapat Teknis pengendalian Inflasi Daerah

Hari / tanggal : Selasa / 23 September 2025

Tempat : Ruang Rapat Lantai 3 Pemkot Lubuk Linggau

Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hidayat memimpin langsung rapat teknis pengendalian inflasi daerah Kota Lubuk Linggau di Op Room Lantai 3 Kantor Wali Kota Lubuk Linggau. Dalam arahannya, H Rachmat Hidayat menegaskan pentingnya kerja sama seluruh pihak dalam menjaga kestabilan harga di pasaran agar angka inflasi di Kota Lubuk Linggau tetap terkendali. “Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menekan harga pasar adalah dengan menggelar pasar murah bersama TNI dan Polri, menjaga ketersediaan pasokan bahan pokok, serta melakukan sidak ke pasar maupun distributor agar tidak terjadi penahanan

barang,” bebernya. Lebih lanjut, beberapa langkah strategis yang bisa dilakukan di antaranya pencaangan gerakan menanam melalui Dinas Pertanian, koordinasi dengan penghasil komoditi untuk memastikan kelancaran pasokan, realisasi belanja tak terduga guna mendukung program pengendalian inflasi, serta pemberian bantuan transportasi bagi distribusi kebutuhan pokok. Untuk mengendalikan inflasi di Kota Lubuk Linggau maka akan dilaksanakan gerakan pangan murah, sidak ke pasar, serta diskusi langsung dengan para pedagang. Setiap OPD terkait juga diminta untuk membuat operator pelaporan. Apabila ada OPD yang lambat melapor, maka dilakukan upaya jemput bola. Laporan inflasi akan dibuat secara mingguan dan dikoordinasikan melalui grup TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah). Sekretaris Daerah Kota Lubuk Linggau, H Trisko Defriyansa menambahkan, berdasarkan surat dari Gubernur, beberapa daerah telah melakukan langkah konkret dalam pengendalian inflasi yang tercatat melalui sistem pelaporan. “Angka inflasi Agustus 2025 year on year berada di angka 2,92 persen dengan indeks harga konsumen (IHK) sebesar 107,71. Data ini diperbarui oleh Bagian Ekonomi, sedangkan update harga kebutuhan pokok dipublikasikan melalui Diskominfotiksan,” jelasnya. Rapat teknis ini juga dihadiri Asisten III Bidang Administrasi Umum, Herdawan, Kepala Bappedalitbang, H Emra Endi Kesuma, Kepala Dinas Sosial, Hasan Andria, Inspektur, H Resta Irwan Putra, Kepala Dinas Perikanan, Asron Erwandi, Kabag Perekonomian dan SDA, Yulia Efrina, serta perwakilan dinas terkait lainnya

14. Rapat Persiapan Operasi Pasar Murah

Hari / tanggal : Kamis / 25 September 2025

Tempat : Ruang Rapat Lantai 3 Pemkot Lubuk Linggau

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Lubuk Linggau, H. Trisko Defriyansa, memimpin Rapat Persiapan Pelaksanaan Operasi Pasar Murah (OPM) di Op Room Lantai 3 Pemkot Lubuk Linggau.

Rapat ini digelar dalam rangka meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di Kota Lubuk Linggau. Menurut Sekda, OPM menjadi langkah nyata pemerintah dalam menghadirkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau bagi masyarakat. “Program ini diharapkan dapat membantu meringankan beban warga, terutama menghadapi potensi kenaikan harga pangan,” ujarnya.

Pelaksanaan OPM akan dilaksanakan secara bertahap di setiap kecamatan mulai 29 September – 2 Oktober 2025. Selain itu, kegiatan juga akan dipusatkan di Alun-alun Merdeka pada minggu kedua Oktober 2025, bertepatan dengan rangkaian peringatan HUT Kota Lubuk Linggau ke-24.

Dalam pelaksanaan OPM nanti, pemerintah akan memprioritaskan sembilan bahan pokok (sembako) agar masyarakat bisa lebih mudah mendapatkan kebutuhan sehari-hari dengan harga stabil.

Rapat ini turut dihadiri oleh Asisten II Setda Kota Lubuk Linggau Heri Zulianta, Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan H. Kamaludin, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Medholine Sapta Windu, serta Kabag Perekonomian dan SDA Yulia Efrina, perwakilan OPD terkait dan para distributor.

Sekda berharap seluruh pihak yang terlibat dapat bersinergi agar program ini berjalan lancar dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat. “Dengan kerja sama semua pihak, kita optimis OPM akan sukses dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.

1. Pencanangan Gerakan Menanam

1. Mengikuti Kegiatan Panen Raya, Dukung Program Swasembada Pangan Presiden RI

Hari / tanggal : Selasa/ 1 Juli 2025

Tempat : Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuk Linggau

Timur l

Wali Kota Lubuk Linggau Panen Raya, Dukung Program Swasembada Pangan Presiden RI

LUBUK LINGGAU-Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hidayat, melakukan panen raya bersama petani yang berlokasi di Jalan Sanudin Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuk Linggau Timur I, Selasa (1/7/2025). Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap program swasembada pangan nasional yang dicanangkan Presiden RI, Prabowo Subianto. Dalam sambutannya, wali kota menyampaikan bahwa panen ini menjadi bagian dari komitmen daerah untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kota Lubuk Linggau. “Dengan kegiatan seperti ini, kebutuhan pangan masyarakat bisa terpenuhi. Pemerintah kota akan terus hadir dan mendukung para petani,” ujarnya. Menurutnya, wilayah Kota Lubuk Linggau memiliki sekitar 1.500 hektar lahan pertanian. Namun, keterbatasan alat dan mesin pertanian (alsintan) masih menjadi tantangan. Pemerintah akan mengupayakan pengadaan alsintan baik melalui usulan ke pemerintah pusat maupun lewat anggaran daerah (APBD). “Kebutuhan alsintan di wilayah kita sekitar 20 hingga 30 unit, seperti alat bajak dan penggilingan. Ini penting untuk mendukung produktivitas petani,” tandasnya. Dia juga menyoroti pentingnya ketersediaan pupuk bersubsidi yang tepat sasaran. Pemerintah akan memastikan distribusi pupuk berjalan baik dan tidak terjadi penyelewengan oleh distributor. “Perbedaan harga pupuk subsidi dan non-subsidi cukup signifikan. Maka distribusinya harus diawasi ketat agar sampai ke petani yang berhak,” tambahnya. Dalam kesempatan itu, H Rachmat Hidayat menyebutkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Komisi IV DPR RI terkait pengadaan alsintan. Jika bantuan pusat belum tersedia, pemerintah daerah akan mencari solusi melalui APBD. Sementara itu, pemilik lahan sawah yang dipanen, Sahlin, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah kota yang telah hadir dan memberikan dukungan nyata kepada petani. “Setiap minggu pemerintah selalu hadir mendengar keluhan petani, termasuk memastikan pupuk subsidi mudah didapat. Kami sangat berterima kasih,” ujarnya.

2. Mengikuti Kegiatan Panen Sayuran Hidroponik bersama Ketua PKK di Dinas Pertanian Kota LubukLinggau

Hari/tanggal : Rabu /13 Agustus 2025

Tempat : Dinas Pertanian Kota Lubuk Linggau

3. Pelaksanaan Kegiatan Panen Sayur pada Dinas Pertanian

Wali Kota Lubuk Linggau, H. Rachmat Hidayat melalui Staf Ahli III Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, H Heri Zulianta menghadiri kegiatan Panen Sayur pada Hewan Penular Rabies (HPR) yang digelar Dinas Pertanian Kota Lubuk Linggau.

Hari/tanggal : Jum'at /26 September 2025

Tempat : Kelurahan Air Kuti Rahma Kec. LLG Timur I

Foto dokumentasi Kegiatan Panen Sayur

4. Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Jagung Serentak Kuartal III secara Virtual untuk mendukung Swasembada Pangan 2025

Lubuk Linggau – Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hidayat melalui Staf Ahli II Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, H Kamaludin menghadiri kegiatan Penanaman Jagung Serentak Kuartal III di lahan perhutanan sosial dalam rangka mendukung swasembada pangan nasional tahun 2025. Acara tersebut dilaksanakan secara virtual di Lahan BPP Kelurahan Rahma, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan I, pada Rabu (9/7/2025).

Kegiatan penanaman jagung secara nasional ini dipusatkan di Provinsi Jawa Tengah dan

dipimpin langsung oleh Kapolri, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo bersama Menteri Pertanian, Dr. Andi Amran Sulaiman. Dalam kesempatan tersebut, Polres Lubuk Linggau turut mengambil bagian dengan melaksanakan penanaman jagung serentak di wilayah Kota Lubuk Linggau. Kegiatan ini dihadiri Kapolres Lubuk Linggau beserta jajaran, perwakilan Dinas Pertanian, Dispang, kelompok tani, mahasiswa, dan insan pers.

Program Penanaman Jagung Serentak ini merupakan inisiatif Polri bekerja sama dengan Kementerian Pertanian sebagai wujud nyata kontribusi terhadap ketahanan pangan nasional. Selain meningkatkan produktivitas pertanian, kegiatan ini juga diharapkan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar lahan perhutanan social

1. Melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait

1. Kegiatan Operasi Pasar Murah dengan Penyediaan 7 ton Beras Bulog, Minyak Goreng dan Bahan Pokok Lainnya

Hari : Senin, 1 September 2025

Tempat : Lapangan Eks Kompi Taba Pingin

1. Gerakan Pangan Murah yang digelar tim Sekretariat TPID Kota Lubuk Linggau bekerja sama dengan Bulog dengan penyaluran 2 ton Beras dalam kemasan 5 Kg

Hari : Rabu, 24 September 2025

Tempat : Halaman Gedung Kesenian Pemkot LubukLinggau

Wali Kota Lubuk Linggau Hadiri Gerakan Pangan Murah (GPM) di Halaman Gedung Kesenian).

Pada kegiatan GPM, Bulog menyalurkan 2 ton beras dalam kemasan 5 kilogram yang dijual kepada masyarakat dengan harga lebih terjangkau dibandingkan harga pasar. Wali Kota H Rachmat Hidayat menegaskan, keberadaan GPM sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok di tengah tingginya harga pangan. "Melalui GPM, masyarakat dapat membeli kebutuhan pangan dengan harga lebih murah dari pasar. Ini adalah salah satu upaya kita untuk menjaga daya beli masyarakat," ujarnya.

1. Gerakan Pangan Murah

Hari : Selasa, 30 September 2025

Tempat : Halaman Kantor Camat Lubuk Linggau Barat i dan Lubuk Linggau Barat II

1. Melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan bersama Dinas Ketahanan Pangan di Kecamatan LubukLinggau Utara i

Hari : Senin, 29 September 2025

Tempat : Halaman kantor Kec. Lubuk Linggau Utara I dan Lubuk Linggau Utara II

1. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang

Wali Kota Lubuk Linggau melaksanakan Sidak ke Pasar Inpres

Hari : Rabu, 24 September 2025

Tempat : Pasar Inpres kota Lubuk Linggau

Mekanisme Koordinasi TPID

Tugas-tugas TPID dilakukan melalui pertemuan dalam bentuk high level meeting dan melalui mekanisme koordinasi, yaitu dengan melakukan rapat koordinasi untuk merumuskan rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti pemerintah daerah untuk mencegah dan menanggulangi kenaikan dan ketidakstabilan inflasi serta melakukan koordinasi dengan TPID di tingkat Provinsi.

Mekanisme koordinasi TPID :

Monitoring, Evaluasi serta Kebijakan pengendalian inflasi

Monitoring, Evaluasi serta Kebijakan pengendalian inflasi

TPID KAB/KOTA

TPID PROV.

KEMENTERIAN
DALAM NEGERI

Kepada Gubernur

Pelaksanaan Program Kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Kota Lubuklinggau pada Triwulan I tahun 2025 mengacu pada 9 langkah upaya dalam pengendalian inflas dalam rangka pemenuhan program kerja pengendalian inflasi yang mencakup 4 k yaitu : keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif. Pada triwulan ke 1 tahun 2025 ini pemeritah kota lubuklinggau telah melaksanakan 5 upaya dari 9 langkah upaya berikut. Adapun 5 upaya dalam pengendalian inflasi yang telah dilakukan pemerintah kota lubuklingga adalah sebagai berikut :

1. Pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia.

Kegiatan pemantauan harga dilakukan setiap hari oleh petugas dari disperindag untuk dilaporkan di system pemantauan pasar dan kebutuhan pokok (SP2KP). Adapun komoditi yang dipantau antara lain : beras, gula pasir, minyak goreng, tepung terigu, cabe merah, cabe rawit, bawang merah, bawang putih, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, jagung pipilan, garam halus, kedelai, ikan segar, semen, biji kontruksi, baja ringan, triplek, kayu balok, kayu papan, paku, pupuk, benih dan gas LPG 3 kg. selain itu disperindag juga melakukan pemantaun harga kebutuhan pokok lainnya yang melekat secara tupoksi pada disperindag kota lubuklinggau.

Kegiatan pemantauan stok pangan yang dilakukan petugas dinas ketahanan pangan setiap minggunya dengan mendata stok yang di bulog, distributor pedagang grosir, dan pedagang eceran. Kegiatan pemantauan ini bertujuan untuk tercapainya ketersediaan bahan pangan utama dengan harga yang stabil dan tersedianya data panel/informasi harga dan pasokan pangan di tingkat produsen, pedagang grosir dan pedagang eceran secara berkala. Adapun komoditi yang menjadi objeknya antara lain : komoditi beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabe besar, cabe rawit, daging sapi, daging ayam, telur ayam, gula pasir, minyak goring, dan tepung terigu. Variable yang menjadi tolak ukurnya adalah stok awal, jumlah produksi, barang yang diimpor, barang yang diekspor, ketersediaan barang dan perkiraan kebutuhan.

Foto pemantuan harga oleh petugas dari disperindag kota lubuklinggau

Foto pemantauan harga dan stok oleh dinas ketahanan pangan kota Lubuklinggau

1. Rapat teknis tim pengendali inflasi daerah

Pemerintah kota Lubuklinggau melalui tim TPID melakukan rapat teknis tim pengendali inflasi daerah dalam upaya pengendalian inflasi. Adapun rapat yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Sekjen Kemeterian Dalam Negeri

Via Zoom Meeting

Hari / tanggal : Senin / 7 Juli 2025

Tempat : Ruang Command Center Pemkot Lubuk Linggau

UBUK LINGGAU-Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hidayat melalui Staf Ahli II Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, H Kamaludin mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi tahun 2025 yang digelar secara virtual melalui Zoom di Command Center Kota Lubuk Linggau, Senin (7/7/2025). Rapat koordinasi ini dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian. Dalam arahannya, Mendagri menyampaikan bahwa pertemuan kali ini difokuskan pada dua isu utama, yakni pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi nasional. Dalam pembahasannya, Tito Karnavian menjelaskan bahwa inflasi terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Inflasi Volatile Foods, yaitu inflasi yang disebabkan oleh fluktuasi harga barang dan jasa yang tidak stabil.
2. Inflasi Administered Prices, yaitu inflasi pada barang dan jasa yang harganya diatur oleh pemerintah, seperti tarif listrik dan BBM.
3. Core Inflation (Inflasi Inti), yaitu inflasi yang disebabkan oleh perkembangan ekonomi makro secara umum, seperti permintaan dan penawaran di pasar.

Untuk menangani dinamika harga yang sangat fluktuatif, pemerintah menerapkan sistem Indeks Perkembangan Harga (IPH). Melalui IPH, petugas Daerah Pengendali Inflasi (DPI) dari kabupaten/kota diwajibkan turun langsung ke pasar, pelabuhan, bandara, hingga mengecek tarif angkutan udara dan harga kebutuhan pokok minimal dua kali dalam seminggu. Data dari IPH ini memungkinkan pemerintah pusat memetakan wilayah dengan tingkat inflasi tertinggi setiap minggunya, sebelum merilis data resmi bulanan. Selain inflasi, rapat juga menyoroti kondisi pertumbuhan ekonomi nasional yang dipengaruhi oleh situasi global, termasuk konflik geopolitik seperti ketegangan antara Israel dan Amerika Serikat, serta potensi gangguan di Selat Hormuz—salah satu dari delapan titik strategis (choke points) perdagangan dunia.

Gangguan di wilayah tersebut

Staf Ahli bidang Ekonomi dan Pembangunan didampingi Bagian Perekonomian dan SDA beserta OPD terkait Mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Sekjen Kementerian Dalam Negeri tanggal 07 juli 2025

2. Mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Sekjen Kementerian Dalam Negeri Via Zoom Meeting

Hari / tanggal : Senin / 14 Juli 2025

Tempat : Ruang Command Center Pemkot Lubuk Linggau

LUBUK LINGGAU-Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hidayat melalui Plt Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, H Heri Zulianta, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi tahun 2025 secara virtual melalui Zoom Meeting di Command Center Kota Lubuk Linggau, Senin (14/7/2025). Rakor dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsu Tohir, yang dalam arahannya menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan operasi pasar guna menekan harga kebutuhan pokok di berbagai wilayah. Tomsu juga meminta agar setiap minggu disampaikan data realisasi per provinsi agar pemerintah pusat bisa memantau turunnya harga serta mengidentifikasi hambatan di lapangan. "Jika harga hanya turun sedikit, akan dicek apa penyebabnya. Pemerintah daerah harus aktif berperan," tambahnya. Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa inflasi nasional bulan Juni 2025 berada dalam kondisi aman, tercatat sebesar 0,19%. Secara tahunan (year-on-year), inflasi mencapai 1,87%, sedangkan secara kalender (Januari-Juni 2025) sebesar 1,38%. Dari sisi komponen harga bergejolak, BPS mencatat bahwa sejak tahun 2022 hingga Juni 2025, komponen ini cenderung lebih sering mengalami inflasi daripada deflasi. Pada Juni 2025, harga-harga dalam kelompok ini kembali mengalami inflasi setelah dua bulan sebelumnya (April dan Mei) mencatat deflasi. Kontributor inflasi terbesar pada Juni 2025 adalah beras dengan andil 0,04%, diikuti cabai rawit, bawang merah, dan tomat. Kenaikan harga-harga tersebut menjadi perhatian pemerintah dalam pengambilan kebijakan pengendalian harga ke depan

Asiten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan didampingi Kabag perekonomian dan Kabid Pokting Disperindag mengikuti Mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Sekjen

3. Mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Sekjen Kementrian Dalam Negeri via Zoom Meeting

Hari / tanggal : Selasa / 29 Juli 2025

Tempat : Ruang Command Center Pemkot Lubuk Linggau

LUBUK LINGGAU-Staf Ahli II Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Setda Kota Lubuk Linggau, Kamaludin, didampingi Kabag Perekonomian dan SDA, Yulia Efrina, mengikuti rapat koordinasi Pengendalian Inflasi secara virtual melalui Zoom Meeting dari Command Center Pemkot Lubuk Linggau, Selasa (29/7/2025). Rapat ini dipimpin Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Tomsu Tohir, yang memaparkan perkembangan inflasi nasional dan daerah berdasarkan data bulan Juni 2025. Ia menyampaikan bahwa sepuluh provinsi mencatatkan inflasi tertinggi, yakni Papua Selatan, Bali, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, DIY, NTB, Sulawesi Tengah, Sumsel, Papua Tengah, dan Lampung. Diharapkan angka inflasi dapat turun pada Juli ini dengan adanya koordinasi lintas sektor. "Rata-rata inflasi nasional sebesar 1,87 persen. Angka ini terbentuk dari kontribusi inflasi kabupaten, kota, dan provinsi. Saat ini ada 65 kabupaten dan 44 kota yang mencatatkan inflasi di atas rata-rata nasional," ujarnya.

Ia juga menyoroti kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di beberapa provinsi, dengan DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, dan Bali berada di peringkat teratas. DKI Jakarta diminta segera melakukan evaluasi atas lonjakan harga yang terjadi secara umum. Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, menjelaskan tren inflasi bulan Juli dari tahun ke tahun. Dari 2021 hingga 2024, bulan Juli cenderung mengalami inflasi, kecuali pada 2024 yang mencatat deflasi 0,18 persen akibat penurunan harga bawang merah. "Inflasi Juli biasanya lebih tinggi dari Juni. Kami akan merilis data resmi inflasi Juli 2025 pada 1 Agustus mendatang. Pola yang terlihat adalah kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar inflasi," jelasnya. Ia juga menambahkan bahwa komponen harga bergejolak seperti cabai merah, cabai rawit, bawang merah, serta tarif angkutan udara dan biaya pendidikan masih menjadi pendorong utama inflasi di bulan Juli dalam beberapa tahun terakhir.

Foto Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi dan Pembangunan didampingi Kepala Bagian Perekonomian dan SDA dan Kabid Perekonomian Bappedalitbang mengikuti Rakor bersama Kemendagri tanggal 29 Juli 2025

4. Pelaksanaan Kegiatan Rilis Berita Resmi Statistik

Hari / tanggal : Jum'at/ 01 Agustus 2025

Tempat : Ruangan Command Center Pemkot Lubuk Linggau

Foto Asiten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan didampingi Kepala Bappedalitbang Kota Lubuk Linggau dan Kepala BPS Kota Lubuk Linggau mengikuti Rilis Statistik Resmi Inflasi Juli 2025

5. Mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Sekjen Kementrian Dalam Negeri via Zoom Meeting

Hari / tanggal : Senin / 11 Agustus 2025

Tempat : Ruang Command Center Pemkot Lubuk Linggau

Wakil Wali Kota Lubuk Linggau, H Rustam Effendi menghadiri rapat Inflasi bersama Kemendagri via Zoom Meeting di Command Center Pemkot Lubuk Linggau, Senin (11/8/2025). Turut mendampingi Plt Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, H Heri Zulianta, Staf Ahli II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, H Kamaludin, Inspektur, H Resta Irwan Putra, Kepala Dinas Perkim Febrio Fadilah, Inspektur, H Resta Irwan Putra Kabid Datin Diskominfo, Arik Sandra Jaya.

Wakil Wali Kota Lubuk Linggau mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Sekjen Kementrian Dalam Negeri via Zoom Meeting di Command Center tanggal 11 Agustus 2025

6. Wali Kota Lubuk Linggau Mengikuti Zoom Meeting Launching GPM

Hari / tanggal : Kamis / 14 Agustus 2025

Tempat : Polres LubukLinggau Ruang Rapat Pemkot Lubuk Linggau

Wali Kota Lubuklinggau H Rachmat Hidayat hadir kegiatan zoom meeting dalam rangka Launching Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dilaksanakan di Polres Lubuklinggau. Kegiatan ini juga diikuti oleh kapolres Lubuklinggau AKBP Adhitya Bagus Arjunadi beserta jajaran perwira polres Lubuklinggau serta sejumlah kepala OPD dilingkungan Pemkot Lubuklinggau.

Secara nasional, kegiatan ini diluncurkan langsung oleh Kapolri, Jendral Listyo Sigit Prabowo. Kegiatan ini berlangsung di kompleks Bulog Kanwil DKI Jakarta, Kamis (14/8/2025). Gerakan Pangan Murah ini dilakukan secara serentak oleh polda jajaran di Indonesia. Jenderal Sigit mengapresiasi progres penyaluran pangan murah melalui Gerakan Pangan Murah di daerah. Menurutnya, penyaluran pangan murah kepada masyarakat sangat membantu meringankan beban masyarakat.

Wali Kota Lubuk Linggau mengikuti Zoom Meeting launching Gerakan Pangan Murah di Polres Lubuk Linggau tanggal 14 Agustus 2025

7. Mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Sekjen Kementrian Dalam Negeri via Zoom Meeting

Hari / tanggal : Selasa / 19 Agustus 2025

Tempat : Ruangan Rapat Command Center Pemkot Lubuk Linggau

Wali Kota Lubuk Linggau H Rachmat Hidayat melalui Staf Ahli II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, H Kamaludin Menghadiri Rapat Inflasi bersama Kemendagri Via Zoom Meeting di Command Center Pemkot Lubuk Linggau, Selasa (19/8/2025).

Wali Kota Lubuk Linggau H Rachmat Hidayat melalui Staf Ahli II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, H Kamaludin Menghadiri Rapat Inflasi bersama Kemendagri Via Zoom Meeting di Command Center Pemkot Lubuk Linggau, Selasa (19/8/2025).

.

Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi dan Pembangunan didampingi oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan beserta Kepala Dinas Pertanian mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Sekjen Kementerian Dalam Negeri via Zoom Meeting di Command Center tanggal 19 Agustus 2025

8. Mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Sekjen Kementerian Dalam Negeri via Zoom Meeting

Hari / tanggal : Senin / 25 Agustus 2025

Tempat : Ruang Rapat Command Center Pemkot Lubuk Linggau

Staf Ahli II Hadiri Rakor Pengendalian Inflasi Bersama Kemendagri via Zoom LUBUK LINGGAU - Wali Kota Lubuk Linggau melalui Staf Ahli II Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Kamaludin mengikuti rapat koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual melalui Zoom Meeting di Command Center Pemkot Lubuk Linggau, Senin (25/8/2025). Dalam arahannya, Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsu Tohir, menegaskan pentingnya upaya maksimal dari pemerintah daerah dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok yang masih tinggi (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan). Ia mendorong agar operasi beras SPHP diperluas hingga ke tingkat desa dan kelurahan, tidak hanya berhenti di tingkat kecamatan "Kedepannya distribusi harus dipetakan dengan baik oleh Kementerian Perdagangan. Dengan pengawasan distribusi, kita bisa mengetahui di mana letak kenaikan harga yang tidak wajar. Bila distribusi cukup namun harga tetap tinggi, berarti ada oknum distributor yang bermain. Kedepannya Kepala daerah dapat melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk mengatasi hal ini," tegasnya. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa berdasarkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu ketiga Agustus 2025, sebanyak 14 provinsi mengalami kenaikan IPH, 23 provinsi mengalami penurunan, dan 1 provinsi tercatat stabil dibandingkan bulan sebelumnya.

Komoditas yang paling berkontribusi terhadap kenaikan IPH adalah cabai merah, bawang merah, beras, dan minyak goreng. Adapun 10 kabupaten/kota dengan IPH tertinggi antara lain Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Aceh Jaya. Sementara itu, daerah dengan penurunan IPH terdalam meliputi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kota Tomohon, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Melawai, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Minahasa Tenggara.

Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi dan Pembangunan didampingi oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Bulog beserta Kepala Dinas Pertanian mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Sekjen Kementerian Dalam Negeri via Zoom Meeting di Command Center tanggal 25 Agustus 2025

9. Mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Sekjen Kementerian Dalam Negeri via Zoom Meeting

Hari / tanggal : Selasa / 2 September 2025

Tempat : Ruang Rapat Command Center Pemkot Lubuk Linggau

Wakil Wali Kota Lubuk Linggau Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi dan Situasi Nasional Bersama Kemendagri LUBUK LINGGAU-Wakil Wali Kota Lubuk Linggau, H Rustam Effendi, mengikuti rapat koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi dan Situasi Terkini yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual melalui Zoom Meeting, Selasa (2/9/2025). Rapat tersebut diikuti dari Command Center Pemkot Lubuk Linggau. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, dalam arahannya menyampaikan bahwa rakor kali ini membahas dua poin utama, yakni perkembangan inflasi nasional dan situasi keamanan terkini di berbagai daerah.

Menurut Mendagri, angka inflasi secara nasional per tahun saat ini tercatat sebesar 2,31 persen, yang dinilai masih dalam kategori terkendali dan mengalami penurunan. Ia meminta kepala daerah untuk mendukung penuh program prioritas Presiden RI demi menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Terkait situasi nasional, Mendagri menyinggung aksi unjuk rasa yang berlangsung sejak 25 Agustus 2025 di 107 titik pada 32 provinsi. Aksi tersebut menyuarakan sejumlah tuntutan seperti penolakan kenaikan tunjangan DPR, penolakan RUU KUHP, pengesahan RUU perampasan aset dan isu lainnya. Beberapa daerah bahkan mengalami kerusakan akibat aksi tersebut. Menanggapi hal ini, Presiden RI telah mengambil langkah-langkah strategis, mulai dari menggelar rapat kabinet, berkoordinasi dengan organisasi kemasyarakatan keagamaan, partai politik, hingga sidang paripurna, serta menginstruksikan rapat koordinasi lintas daerah. Mendagri menekankan agar kepala daerah tidak meninggalkan wilayahnya masing-masing dan mengambil langkah-langkah proaktif dalam menjaga ketertiban dan kondusifitas daerah. "Redam aksi dengan duduk bersama tokoh masyarakat, laksanakan doa bersama, gencarkan program pro-rakyat seperti gerakan pasar murah, tunda kegiatan seremonial maupun keberangkatan ke luar negeri, dan hindari menampilkan gaya hidup mewah," tegas Mendagri. Ia juga mengapresiasi kepala daerah yang telah mengambil langkah-langkah cepat dan responsif dalam menjaga stabilitas di wilayahnya. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Menteri Perdagangan.

Wakil Wali Kota Lubuk Linggau didampingi oleh Sekretaris Daerah dan kepala Bulog Kota Lubuk Linggau beserta OPD terkait mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Sekjen Kementerian Dalam Negeri via Zoom Meeting di Command Center tanggal 02 September 2025

Wakil Wali Kota Lubuk Linggau Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi dan Situasi Nasional Bersama Kemendagri LUBUK LINGGAU-Wakil Wali Kota Lubuk Linggau, H Rustam Effendi, mengikuti rapat koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi dan Situasi Terkini yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual melalui Zoom Meeting, Selasa (2/9/2025). Rapat tersebut diikuti dari Command Center Pemkot Lubuk Linggau. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, dalam arahannya menyampaikan bahwa rakor kali ini membahas dua poin utama, yakni perkembangan inflasi nasional dan situasi keamanan terkini di berbagai daerah.

Menurut Mendagri, angka inflasi secara nasional per tahun saat ini tercatat sebesar 2,31 persen, yang dinilai masih dalam kategori terkendali dan mengalami penurunan. Ia meminta kepala daerah untuk mendukung penuh program prioritas Presiden RI demi menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Terkait situasi nasional, Mendagri menyinggung aksi unjuk rasa yang berlangsung sejak 25 Agustus 2025 di 107 titik pada 32 provinsi. Aksi tersebut menyuarakan sejumlah tuntutan seperti penolakan kenaikan tunjangan DPR, penolakan RUU KUHP, pengesahan RUU perampasan aset dan isu lainnya. Beberapa daerah bahkan mengalami kerusakan akibat aksi tersebut. Menanggapi hal ini, Presiden RI telah mengambil langkah-langkah strategis, mulai dari menggelar rapat kabinet, berkoordinasi dengan organisasi kemasyarakatan keagamaan, partai politik, hingga sidang paripurna, serta menginstruksikan rapat koordinasi lintas daerah. Mendagri menekankan agar kepala daerah tidak meninggalkan wilayahnya masing-masing dan mengambil langkah-langkah proaktif dalam menjaga ketertiban dan kondusifitas daerah. "Redam aksi dengan duduk bersama tokoh masyarakat, laksanakan doa bersama, gencarkan program pro-rakyat seperti gerakan pasar murah, tunda kegiatan seremonial maupun keberangkatan ke luar negeri, dan hindari menampilkan gaya hidup mewah," tegas Mendagri. Ia juga mengapresiasi kepala daerah yang telah mengambil langkah-langkah cepat dan responsif dalam menjaga stabilitas di wilayahnya. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Menteri Perdagangan.

Wakil Wali Kota Lubuk Linggau didampingi oleh Sekretaris Daerah dan kepala Bulog Kota Lubuk Linggau beserta OPD terkait mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Sekjen Kementerian Dalam Negeri via Zoom Meeting di Command Center tanggal 02 September 2025

10. Mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Dengan Sekjen Kementrian Dalam Negeri Via Zoom Meeting

Hari / tanggal : Selasa / 8 September 2025

Tempat : Ruang Rapat Command Center Pemkot Lubuk Linggau

Wali Kota Lubuk Linggau melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, H Kamaludin didampingi Plt Asisten II, H Heri Zulianta mengikuti rapat koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual melalui Zoom Meeting di Command Center Pemkot Lubuk Linggau.

11. Mengikuti Rakor dengan Sekjen Kementrian Dalam Negeri via Zoom Meeting

Hari / tanggal : Selasa / 16 September 2025

Tempat : Ruang Rapat Command Center Pemkot Lubuk Linggau

Staf Ahli II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, H Kamaludin menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dipimpin langsung Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsu Tohir melalui zoom, bertempat di Command Center Pemkot Lubuk Linggau.

Dalam rapat tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) memaparkan laporan terbaru terkait pergerakan Indeks Perubahan Harga (IPH). Tercatat sebanyak 13 provinsi mengalami kenaikan IPH, sementara 23 provinsi mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya.. Adapun dua provinsi yang relatif stabil, yakni Lampung dan Papua Pegunungan dengan IPH 0%. Ketua BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan, komoditas penyumbang utama kenaikan IPH di 13 provinsi mayoritas berasal dari cabai merah, ayam ras, dan beras. Meski demikian, sebanyak 109 kabupaten/kota masih tercatat mengalami kenaikan harga beras. "Sepuluh kabupaten/kota dengan kenaikan IPH tertinggi, bahkan di atas 5%, antara lain Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, Mandailing Natal, Tapanuli Utara, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Asahan, dan Kota Pariaman," jelasnya.

Secara nasional, terdapat 165 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH, dengan catatan

tertinggi di Kota Banjar sebesar 2,24%. Peningkatan ini dipicu harga daging ayam, beras, jeruk, serta cabai rawit.

BPS juga menyoroti perbedaan antara tingkat perubahan IPH dengan level harga komoditas. Ayam ras dan cabai merah tercatat mengalami perubahan harga tinggi namun level harganya relatif rendah. Sebaliknya, beras dan minyak goreng meskipun perubahan IPH rendah, namun sudah berada pada level harga tinggi sehingga menekan daya beli masyarakat.

“Ini menjadi perhatian bersama karena pada akhirnya yang dirasakan masyarakat adalah harga di level konsumen. Walaupun perubahannya kecil, jika harga sudah tinggi tetap memberatkan,” tegas Ketua BPS. Sementara itu, Sekjen Kemendagri, Tomsy Tohir berharap rapat koordinasi ini dapat semakin memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam mengendalikan inflasi.

12. Mengikuti Rapat Koordinasi dengan Kemendagri

Hari / tanggal : Selasa / 23 September 2025

Tempat : Ruang Rapat Command Center Pemkot Lubuk Linggau

Wakil Wali Kota Lubuk Linggau, H Rustam Effendi didampingi Sekretaris Daerah H Trisko Defriyansa, mengikuti rapat koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual melalui Zoom Meeting di Command Center Pemkot Lubuk Linggau, Selasa (23/9/2025).

Turut hadir, Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, H Kamaludin, Kabag Perekonomian dan SDA, Yulia Efrina, Kabag Prokopim, Taufik Hidayat dan perwakilan OPD terkait. (*/esa).

13. Rapat Teknis pengendalian Inflasi Daerah

Hari / tanggal : Selasa / 23 September 2025

Tempat : Ruang Rapat Lantai 3 Pemkot Lubuk Linggau

Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hidayat memimpin langsung rapat teknis pengendalian inflasi daerah Kota Lubuk Linggau di Op Room Lantai 3 Kantor Wali Kota Lubuk Linggau. Dalam arahannya, H Rachmat Hidayat menegaskan pentingnya kerja sama seluruh pihak dalam menjaga kestabilan harga di pasaran agar angka inflasi di Kota Lubuk Linggau tetap terkendali. “Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menekan harga pasar adalah dengan menggelar pasar murah bersama TNI dan Polri, menjaga ketersediaan pasokan bahan pokok, serta melakukan sidak ke pasar maupun distributor agar tidak terjadi penahanan

barang,” bebrnya. Lebih lanjut, beberapa langkah strategis yang bisa dilakukan di antaranya pencaanangan gerakan menanam melalui Dinas Pertanian, koordinasi dengan penghasil komoditi untuk memastikan kelancaran pasokan, realisasi belanja tak terduga guna mendukung program pengendalian inflasi, serta pemberian bantuan transportasi bagi distribusi kebutuhan pokok. Untuk mengendalikan inflasi di Kota Lubuk Linggau maka akan dilaksanakan gerakan pangan murah, sidak ke pasar, serta diskusi langsung dengan para pedagang. Setiap OPD terkait juga diminta untuk membuat operator pelaporan. Apabila ada OPD yang lambat melapor, maka dilakukan upaya jemput bola. Laporan inflasi akan dibuat secara mingguan dan dikoordinasikan melalui grup TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah). Sekretaris Daerah Kota Lubuk Linggau, H Trisko Defriyansa menambahkan, berdasarkan surat dari Gubernur, beberapa daerah telah melakukan langkah konkret dalam pengendalian inflasi yang tercatat melalui sistem pelaporan. “Angka inflasi Agustus 2025 year on year berada di angka 2,92 persen dengan indeks harga konsumen (IHK) sebesar 107,71. Data ini diperbarui oleh Bagian Ekonomi, sedangkan update harga kebutuhan pokok dipublikasikan melalui Diskominfortiksan,” jelasnya. Rapat teknis ini juga dihadiri Asisten III Bidang Administrasi Umum, Herdawan, Kepala Bappedalitbang, H Emra Endi Kesuma, Kepala Dinas Sosial, Hasan Andria, Inspektur, H Resta Irwan Putra, Kepala Dinas Perikanan, Asron Erwandi, Kabag Perekonomian dan SDA, Yulia Efrina, serta perwakilan dinas terkait lainnya

14. Rapat Persiapan Operasi Pasar Murah

Hari / tanggal : Kamis / 25 September 2025

Tempat : Ruang Rapat Lantai 3 Pemkot Lubuk Linggau

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Lubuk Linggau, H. Trisko Defriyansa, memimpin Rapat Persiapan Pelaksanaan Operasi Pasar Murah (OPM) di Op Room Lantai 3 Pemkot Lubuk Linggau.

Rapat ini digelar dalam rangka meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di Kota Lubuk Linggau. Menurut Sekda, OPM menjadi langkah nyata pemerintah dalam menghadirkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau bagi masyarakat. “Program ini diharapkan dapat membantu meringankan beban warga, terutama menghadapi potensi kenaikan harga pangan,” ujarnya.

Pelaksanaan OPM akan dilaksanakan secara bertahap di setiap kecamatan mulai 29 September – 2 Oktober 2025. Selain itu, kegiatan juga akan dipusatkan di Alun-alun Merdeka pada minggu kedua Oktober 2025, bertepatan dengan rangkaian peringatan HUT Kota Lubuk Linggau ke-24.

Dalam pelaksanaan OPM nanti, pemerintah akan memprioritaskan sembilan bahan pokok (sembako) agar masyarakat bisa lebih mudah mendapatkan kebutuhan sehari-hari dengan harga stabil.

Rapat ini turut dihadiri oleh Asisten II Setda Kota Lubuk Linggau Heri Zulianta, Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan H. Kamaludin, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Medholine Sapta Windu, serta Kabag Perekonomian dan SDA Yulia Efrina, perwakilan OPD terkait dan para distributor.

Sekda berharap seluruh pihak yang terlibat dapat bersinergi agar program ini berjalan lancar dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat. “Dengan kerja sama semua pihak, kita optimis OPM akan sukses dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.

1. Pencanaan Gerakan Menanam

1. Mengikuti Kegiatan Panen Raya, Dukung Program Swasembada Pangan Presiden RI

Hari / tanggal : Selasa/ 1 Juli 2025

Tempat : Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuk Linggau

Timur l

Wali Kota Lubuk Linggau Panen Raya, Dukung Program Swasembada Pangan Presiden RI

LUBUK LINGGAU-Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hidayat, melakukan panen raya bersama petani yang berlokasi di Jalan Sanudin Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuk Linggau Timur I, Selasa (1/7/2025). Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap program swasembada pangan nasional yang dicanangkan Presiden RI, Prabowo Subianto. Dalam sambutannya, wali kota menyampaikan bahwa panen ini menjadi bagian dari komitmen daerah untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kota Lubuk Linggau. “Dengan kegiatan seperti ini, kebutuhan pangan masyarakat bisa terpenuhi. Pemerintah kota akan terus hadir dan mendukung para petani,” ujarnya. Menurutnya, wilayah Kota Lubuk Linggau memiliki sekitar 1.500 hektar lahan pertanian. Namun, keterbatasan alat dan mesin pertanian (alsintan) masih menjadi tantangan. Pemerintah akan mengupayakan pengadaan alsintan baik melalui usulan ke pemerintah pusat maupun lewat anggaran daerah (APBD). “Kebutuhan alsintan di wilayah kita sekitar 20 hingga 30 unit, seperti alat bajak dan penggilingan. Ini penting untuk mendukung produktivitas petani,” tandasnya. Dia juga menyoroti pentingnya ketersediaan pupuk bersubsidi yang tepat sasaran. Pemerintah akan memastikan distribusi pupuk berjalan baik dan tidak terjadi penyelewengan oleh distributor. “Perbedaan harga pupuk subsidi dan non-subsidi cukup signifikan. Maka distribusinya harus diawasi ketat agar sampai ke petani yang berhak,” tambahnya. Dalam kesempatan itu, H Rachmat Hidayat menyebutkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Komisi IV DPR RI terkait pengadaan alsintan. Jika bantuan pusat belum tersedia, pemerintah daerah akan mencari solusi melalui APBD. Sementara itu, pemilik lahan sawah yang dipanen, Sahlin, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah kota yang telah hadir dan memberikan dukungan nyata kepada petani. “Setiap minggu pemerintah selalu hadir mendengar keluhan petani, termasuk memastikan pupuk subsidi mudah didapat. Kami sangat berterima kasih,” ujarnya.

2. Mengikuti Kegiatan Panen Sayuran Hidroponik bersama Ketua PKK di Dinas Pertanian Kota LubukLinggau

Hari/tanggal : Rabu /13 Agustus 2025

Tempat : Dinas Pertanian Kota Lubuk Linggau

3. Pelaksanaan Kegiatan Panen Sayur pada Dinas Pertanian

Wali Kota Lubuk Linggau, H. Rachmat Hidayat melalui Staf Ahli III Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, H Heri Zulianta menghadiri kegiatan Panen Sayur pada Hewan Penular Rabies (HPR) yang digelar Dinas Pertanian Kota Lubuk Linggau.

Hari/tanggal : Jum'at /26 September 2025

Tempat : Kelurahan Air Kuti Rahma Kec. LLG Timur I

Foto dokumentasi Kegiatan Panen Sayur

4. Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Jagung Serentak Kuartal III secara Virtual untuk mendukung Swasembada Pangan 2025

Lubuk Linggau – Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hidayat melalui Staf Ahli II Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, H Kamaludin menghadiri kegiatan Penanaman Jagung Serentak Kuartal III di lahan perhutanan sosial dalam rangka mendukung swasembada pangan nasional tahun 2025. Acara tersebut dilaksanakan secara virtual di Lahan BPP Kelurahan Rahma, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan I, pada Rabu (9/7/2025).

Kegiatan penanaman jagung secara nasional ini dipusatkan di Provinsi Jawa Tengah dan

dipimpin langsung oleh Kapolri, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo bersama Menteri Pertanian, Dr. Andi Amran Sulaiman. Dalam kesempatan tersebut, Polres Lubuk Linggau turut mengambil bagian dengan melaksanakan penanaman jagung serentak di wilayah Kota Lubuk Linggau. Kegiatan ini dihadiri Kapolres Lubuk Linggau beserta jajaran, perwakilan Dinas Pertanian, Disbang, kelompok tani, mahasiswa, dan insan pers.

Program Penanaman Jagung Serentak ini merupakan inisiatif Polri bekerja sama dengan Kementerian Pertanian sebagai wujud nyata kontribusi terhadap ketahanan pangan nasional. Selain meningkatkan produktivitas pertanian, kegiatan ini juga diharapkan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar lahan perhutanan social

1. Melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait

1. Kegiatan Operasi Pasar Murah dengan Penyediaan 7 ton Beras Bulog, Minyak Goreng dan Bahan Pokok Lainnya

Hari : Senin, 1 September 2025

Tempat : Lapangan Eks Kompi Taba Pingin

1. Gerakan Pangan Murah yang digelar tim Sekretariat TPID Kota Lubuk Linggau bekerja sama dengan Bulog dengan penyaluran 2 ton Beras dalam kemasan 5 Kg

Hari : Rabu, 24 September 2025

Tempat : Halaman Gedung Kesenian Pemkot LubukLinggau

Wali Kota Lubuk Linggau Hadiri Gerakan Pangan Murah (GPM) di Halaman Gedung Kesenian).

Pada kegiatan GPM, Bulog menyalurkan 2 ton beras dalam kemasan 5 kilogram yang dijual kepada masyarakat dengan harga lebih terjangkau dibandingkan harga pasar. Wali Kota H Rachmat Hidayat menegaskan, keberadaan GPM sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok di tengah tingginya harga pangan. "Melalui GPM, masyarakat dapat membeli kebutuhan pangan dengan harga lebih murah dari pasar. Ini adalah salah satu upaya kita untuk menjaga daya beli masyarakat," ujarnya.

1. Gerakan Pangan Murah

Hari : Selasa, 30 September 2025

Tempat : Halaman Kantor Camat Lubuk Linggau Barat I dan Lubuk Linggau Barat II

1. Melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan bersama Dinas Ketahanan Pangan di Kecamatan LubukLinggau Utara I

Hari : Senin, 29 September 2025

Tempat : Halaman kantor Kec. Lubuk Linggau Utara I dan Lubuk Linggau Utara II

1. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang

Wali Kota Lubuk Linggau melaksanakan Sidak ke Pasar Inpres

Hari : Rabu, 24 September 2025

Tempat : Pasar Inpres kota Lubuk Linggau

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi Kebijakan Pengendalian Inflasi di Kota Lubuk Linggau untuk Triwulan III Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait melalui tim TPID kota lubuklinggau memerlukan penguatan koordinasi dengan TPID Provinsi Sumatera Selatan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan menjaga kelancaran distribusi Komoditas Pangan di Kota Lubuk Linggau.
 2. Dalam rangka pemenuhan Stok untuk Komoditi cabe sebagai jenis Komoditas Pangan yang sering mengalami lonjakan harga, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Lubuk Linggau telah melakukan Penjajakan Kerja Sama ke Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. Diharapkan Kerja Sama yang terjalin tidak hanya sebatas interaksi Pemerintah ke Pemerintah (G-to-G) melainkan merangkul koneksi bisnis ke bisnis (B-to-B) dengan berlanjut pada transaksi antar Distributor dengan Champion yang terkait. Sehingga Politik berfungsi sebagai fasilitator bagi pertumbuhan hubungan ekonomi yang sesungguhnya.
 3. Terkait Keterjangkauan Harga, untuk pelaksanaan Operasi Pasar Murah diperlukan penajaman sasaran dan pemantauan dampak secara real-time dalam rangka efektivitas intervensi agar kebijakan yang diambil lebih responsif.
 4. Kebutuhan akan inovasi dalam mendukung ketersediaan pangan sepanjang tahun dan kelancaran distribusi serta indikasi surplus defisit pangan di masing-masing daerah.
5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Memperhatikan perkembangan inflasi Kota Lubuk Linggau pada Triwulan III serta dinamika pasokan, harga, dan distribusi barang kebutuhan pokok, beberapa rekomendasi kebijakan strategis perlu diakselerasi guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Rekomendasi ini disusun berdasarkan identifikasi potensi risiko inflasi, pola musiman, serta evaluasi efektivitas program pengendalian yang telah berjalan.

1. Peningkatan Efektivitas Operasi Pasar dan Pasar Murah

Melihat masih adanya tekanan harga pada beberapa komoditas tertentu, rekomendasi kebijakan diarahkan pada pelaksanaan operasi pasar secara lebih terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Intervensi harga perlu dilakukan pada titik-titik rawan inflasi, terutama wilayah padat penduduk dan kelurahan dengan tingkat kerentanan pasokan tinggi.

2. 2. Penguatan Pengawasan Distribusi dan Stabilitas Harga

Untuk meminimalkan praktik spekulatif, penahanan pasokan, dan potensi distorsi harga, perlu dilakukan intensifikasi koordinasi dengan Satgas Pangan, Dinas Perdagangan, serta stakeholder terkait. Mekanisme monitoring harga harian berbasis digital harus dimaksimalkan.

3. 3. Pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT)

Rekomendasi ini menekankan penggunaan BTT secara tepat guna untuk memperkuat kegiatan stabilisasi pasokan dan harga, termasuk subsidi distribusi, penyangga komoditas, serta kegiatan operasi pasar.

4. 4. Penguatan Komunikasi Publik dan Edukasi Konsumen

Informasi terkait pasokan, tren harga, serta langkah-langkah stabilisasi pemerintah harus disampaikan secara berkala untuk mencegah inflasi ekspektasian.

7. Penguatan Koordinasi TPID dan Percepatan Implementasi Program 4K

Perlu penguatan fungsi koordinasi TPID dalam menerapkan strategi 4K dengan langkah operasional yang lebih terukur dan berbasis data.